



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017- 2022 maka perlu ditetapkan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.

8. Kinerja keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Kinerja Instansi Pemerintah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai pjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang dilaksanakan
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Batang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Lampiran I : Peraturan Bupati Batang

Nomor :

Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penjelasan/alasan	Penanggungjawab	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi					Nilai yang didapat dari kemenpan RB		Inspektorat	
		2	OPD yang mendapat opini WBK					Jumlah OPD yang mendapat opini WBK			
				1	Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang				IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Rata-rata skor hasil SKM di Kab. Batang	SETDA
				2	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Indeks Profesionalitas ASN				BKD
				2		Nilai SAKIP			Nilai SAKIP yang diperoleh dari Kemenpan RB		SETDA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penjelasan/alasan	Penanggungjawab	
				3	Opini BPK	Predikat penilaian oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	INSPEKTORAT	
				4	Nilai LPPD	Nilai LPPD pada tahun n oleh tim kemendagri	SETDA	
				2	Skor PeGi	Skor PeGi (Pemeringkatan E-Government)	Skor PeGi / SPBE dapat menjadi tolok ukur bahwa E Government telah sesuai standar nasional atau belum	DISKOMINFO
				3	Smart City/ Smart Village	Persentase penerapan smart city dan smart village	Dengan penerapan smart city dan smart village, pelayanan publik bisa lebih efektif dan efisien	DISKOMINFO
2.	Meningkatkan kualitas manusia Batang seutuhnya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)						
			1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik	Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk		
			2	Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh	Rata-rata nilai ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs	Cukup jelas	DISDIKBUD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penjelasan/alasan	Penanggungjawab
			penduduk Batang				
3.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan dengan serta pengendalian penduduk	Indeks Desa Membangun (IDM)					
			1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
				2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
				3 Kecamatan ramah anak			
			2 Terwujudnya pengendalian penduduk dan meningkatnya validitas database kependudukan	1 Pertumbuhan penduduk per tahun			
				2 Menurunnya persentase data ganda dan anomali			
			3 Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausahaan dalam mengelola potensi lokal	Persentase lapangan usaha yang diciptakan oleh pemuda			

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penjelasan/alasan	Penanggungjawab	
			serta pengembangan industri kreatif					
			4 Meningkatkan akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM	1	Kontribusi keuangan terhadap lapangan usaha “jasa keuangan dan asuransi” pada PDRB ADHB”			
				2	Pertumbuhan produktifitas UMKM			
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	1	Pertumbuhan ekonomi					
		2	Pedapatan per kapita					
			1 Meningkatkan jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bari masyarakat	1	Jumlah realisasi nilai investasi			
				2	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	Jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%		DPMPTSP dan Naker
				3	Pertumbuhan Industri	Jumlah industri tahun n dikurangi jumlah industri tahun (n-1) dibagi jumlah industri s/d tahun n dikalikan 100%		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penjelasan/alasan	Penanggungjawab
				4	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB-ADHB	Jumlah kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri pengolahan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	
			Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB-ADHB	Jumlah kontribusi PDRB ADHB dari sektor pertanian dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	
				2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	Persentase angka kecukupan gizi (AKG) dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan	
				3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi PDRB ADHB dari sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	
			Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi PDRB ADHB dari sektor pariwisata dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	
			Meningkatnya produksi		Kontribusi sektor perikanan	Jumlah kontribusi PDRB ADHB dari sektor	

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penjelasan/alasan	Penanggungjawab
					perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari		terhadap PDRB ADHB	perikanan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%		
					Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial		Persentase penduduk miskin			
5	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (KLH)							
		2	Indeks Kepuasan layanan infrastruktur							
				1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah	1	Persentase zona/wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi			
				2	Meningkatnya pengelolaan RTH, penyediaan air baku, dan	1	Indeks standar pencemaran udara			
						2	Rasio ruang terbuka hijau			

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penjelasan/alasan	Penanggungjawab
					penanggulangan masalah rob dan abrasi	3	Persentase penurunan luasan rob dan abrasi			
						4	Persentase ketersediaan air yang memenuhi kualitas standar air baku			
6	Meningkatkan system keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya	1	Persen konflik sosial dan budaya				Jumlah konflik sosial dan budaya			
				1	Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning system penanggulangan bencana	1	Persentase penurunan angka kriminalitas	Jumlah angka kriminalitas tahun (n-1) dikurangi jumlah angka		
						2	Penurunan kerugian bencana			
				2	Meningkatnya integrase nilai - nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	1	Persentase penurunan konflik SARA			

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Lampiran II : Peraturan Bupati Batang
 Nomor :
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG**

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
	Sekretariat Daerah						
1.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Batang	1 Meningkatkan Nilai Evaluasi LKjIP Kab 2 Meningkatkan Nilai Evaluasi LKjIP Setda 3 Ketepatan Waktu Penyusunan LPPD dan LPPD AMJ , LKPJ dan LKPJ AMJ serta Memori Bupati 4 Presentase Lelang Melalui <i>e-procurement</i>	Hasil penilaian dari Kemenpan RB terhadap AKIP Kabupaten Skor LKjIP tahun N Ada/ tidak dokumen Jumlah paket yang dilelang dibagi jumlah total paket lelang dikalikan 100%	Hasil penilaian dari Kemenpan RB terhadap AKIP Kabupaten Skor LKjIP tahun N Ada/tidak dokumen Untuk mengetahui capaian lelang melalui <i>e-procurement</i>	Bagian Organisasi Bagian organisasi Bagian Pemerintahan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	setda setda setda setda
2.		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	1 Jumlah kegiatan Bimtek bagi ASN dalam organisasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 2 Tersusunnya analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di OPD 3 Meningkatkan kompetensi	Kegiatan bintek bagi ASN dalam organisasi pengadaan Barang/ Jasa Jumlah OPD yang sudah menyusun dokumen anjab, ABK,dan evjab Jumlah perangkat	Untuk menambah kompetensi ASN dalam pelaksanaan pembangunan Ada beberapa OPD yang belum menyusun dokumen anjab, ABK, dan Evjab Jumlah perangkat	Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Organisasi Bagian	setda setda Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
			Aparatur	daerah yang mengikuti forkompanda	daerah yang mengikuti forkompanda	Organisasi		
3.		Meningkatnya Penyerapan Anggaran	1	Persentase penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu	Jumlah paket pekerjaan selesai tepat waktu dibagi jumlah seluruh paket pekerjaan dikalikan 100%	Untuk mengendalikan penyelesaian pekerjaan agar tepat waktu	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
			2	Jumlah tenaga terampil kontruksi yang bersertifikat LPJK	Tenaga terampil kontruksi yang lulus sertifikat SKT LPJK tahun berkenaan	Untuk meningkatkn profesionalisme penyelenggaraan jasa kontruksi	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
			3	Persentase monitoring pelaksanaan pekerjaan	Julah kegiatan monitorig paket pekerjaan dibagi jumlah seluruh paket pekerjaan dikalikan 100%	Untuk memonitor paket pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
			2	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ada/tidak ada	Ada/tidak	Bagian Umum	Setda
			3	Presentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tahun N	Persentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tahun N	Bagian Umum	Setda
4.		Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur	1	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan masyarakat terpadu di kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN tahun N	Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN tahun N	Bagian Pemerintahan	Setda
			2	Terlaksananya peringatan HUT kemerdekaan RI, hari jadi Kabupaten Batang, dan pelantikan kepala desa terpilih	Jumlah kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI, hari jadi Kabupaten Batang, dan pelantikan kepala	Jumlah kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI, hari jadi Kabupaten Batang, dan	Bagian Pemerintahan	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				desa terpilih	pelantikan kepala desa terpilih		
			3	nilai IKM Setda	Nilai IKM setda tahun N	Bagian Organisasi	Setda
			4	Tersusunnya Roadmap RB dan renstra Setda	Ada/ tidak	Bagian Organisasi	Setda
			5	Presentase OPD yang telah melaksanakan SOP	Perangkat daerah yang sudah melaksanakan SOP dibagi jumlah perangkat daerah dikalikan 100%	Bagian Organisasi	Setda
			6	Presentase jumlah aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tertangani	Jumlah aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang masuk dikalikan 100%	Bagian Organisasi	Setda
			7	Presentase penerima hibah yang melengkapi persyaratan pencairan	Jumlah penerima hibah yang memenuhi persyaratan dibagi jumlah pengajuan hibah dikalikan 100%	Bagian Kesra	Setda
			8	Presentase penerima hibah tepat sasaran	Jumlah penerima hibah yang tepat sasaran dibagi jumlah pengajuan hibah dikalikan 100%	Bagian Kesra	Setda
			9	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan tahun N	Bagian Umum	Setda
5.		Meningkatnya Penyelenggaraan	1	Persentase publikasi kegiatan pemerintah Kab. Batang	Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput	Bagian Humas	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
		Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (<i>e-Government</i>)			dan diberitakan	pembangunan dan kemasyarakatan yang diliput dan dipublikasikan di media cetak, media sosial		
			2	Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah Kab. Batang	Jumlah kegiatan yang didokumentasikan foto dan video	Dokumentasi foto dan video kegiatan pemerintah Kab Batang	Bagian Humas	Setda
			3	Jumlah pertemuan kegiatan kehumasan dengan OPD dan media massa	Jumlah pertemuan bakohumas dan media gatering	Kegiatan kehumasan dan media gatering	Bagian Humas	Setda
				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu	Jumlah perangkat daerah yang laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah seluruh PD dikalikan 100%	Untuk mencapai 100% laporan perangkat daerah tepat waktu	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
				Persentase perangkat daerah yang lengkap dokumen pengadaan barang/jasa	Jumlah pengajuan kelengkapan dokumen pengadaan dibagi jumlah surat keterangan yang terbit dikalikan 100%	Untuk memverifikasi kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	Setda
6.		Tersusunnya Peraturan Perundang Undangan dan Kebijakan Umum Strategis yang melibatkan stakeholder	1	Presentase jumlah Raperda yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam propemperda	Jumlah raperda yang telah diharmonisasi dibagi jumlah target raperda yang telah diharmonisasi sesuai renja dikali 100%	Untuk mencapai target 100% raperda yang diharmonisasi sesuai renja	Bagian Hukum	Setda
			2	Presentase jumlah Raperbup yang telah diharmonisasi	Jumlah raperbup yang telah diharmonisasi	Untuk mencapai target 100% raperbup yang	Bagian Hukum	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				sesuai usulan dalam propemperda	dibagi jumlah target raperbup yang telah diharmonisasi sesuai renja dikali 100%	diharmonisasi sesuai renja	
			3	Presentase jumlah rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah diharmonisasi sesuai pengajuan dari OPD	Jumlah rancangan SK yang telah diharmonisasi dibagi jumlah target rancangan yang telah di harmonisasi sesuai pengajuan dari OPD dikali 100%	Untuk mencapai target 100% rancangan SK yang diharmonisasi sesuai renja	Bagian Hukum Setda
			4	Presentase jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan gugatan perdata dan TUN yang masuk	Jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan dibagi jumlah perkara hukum yang masuk dikalikan 100%	Untuk mencapai target 100% perkara hukum yang diselesaikan	Bagian Hukum Setda
			5	Presentase jumlah kajian hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan permasalahan hukum yang ada dan atau pengajuan kajian hukum dari OPD	Jumlah kajian hukum yang dapat diselesaikan dibagi jumlah pengajuan kajian dikali 100%	Untuk mencapai target 100% kajian hukum yang dapat diselesaikan	Bagian Hukum Setda
			6	Presentase jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi / penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan berdasarkan RENJA	Jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi /penyuluhan hukum dibagi jumlah target masyarakat yang menghadiri sosialisasi/ penyuluhan hukum sesuai renja dikali 100%	Untuk mencapai target 100% masyarakat yang menghadiri sosialisasi / penyuluhan sesuai renja	Bagian Hukum Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
			7	Presentase jumlah rakor dan pembinaan SJDI berdasarkan RENJA	Jumlah rakor dan pembinaan SJDI yang telah dilaksanakan dibagi target rakor dan pembinaan SJDI sesuai renja dikalikan 100%	Untuk mencapai target 100% rapkor dan pembinaan SJDI sesuai renja	Bagian Hukum	Setda
			8	Presentase jumlah anggota Panpel RANHAM yang mengikuti rakor HAM	Jumlah anggota panpel RANHAM yang mengikuti rakor HAM dibagi target jumlah anggota panpel RANHAM yang mengikuti rakor HAM sesuai renja dikalikan 100%	Untuk mencapai target 100% anggota panpel ranham yang mengikuti rakor HAM sesuai renja	Bagian Hukum	Setda
			9	Presentase jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang tersebarluaskan brdasarkan RENJA	jumlah produk hukum daerah dan per UUan yang disebarluaskan dibagi target produk hukum daerah dan per UUan yang disebarluaskan sesuai renja dikalikan 100%	Untuk mencapai target 100% produk hukum daerah dan peraturan pe UU an yang dipublikasikan / disebarluaskan sesuai renja	Bagian Hukum	Setda
			10	Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum dibagi jumlah target masyarakat yang mendpat layanan bantuan hukum yang ada dikalikan 100%	Untuk mencapai target 100% masyarakat miskin yang mendapat layanan bantuan hukum	Bagian Hukum	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	5	6	7
7.		Terselenggaranya Koordinasi Kinerja secara Efektif	1	Fasilitasi koordinasi pengembangan dunia usaha	Jumlah koordinasi pengembangan dunia usaha	Untuk mengetahui jumlah koordinasi MP3EI	Bag. Perekonomian	Setda
			2	Produktifitas dan kemandirian melalui usaha UMKM	Jumlah UMKM yang mampu bersaing dan mandiri	Untuk mengetahui UMKM yang mampu bersaing dan mandiri	Bagian Perekonomian	Setda
			3	Partisipasi UMKM yang mengikuti pameran	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran	Untuk mengetahui jumla UMKM yang mengikuti pameran	Bagian Perekonomian	Setda
			3	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan Wabup	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan Wabup	Bagian Umum	Setda
8.		Terselenggaranya Kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Stakeholder	1	Fasilitasi koodinasi peningkatan produksi, terpenuhinya sarana produksi bagi petani	Jumlah koordinasi terkait produksi pertanian	Untuk mengetahui ketersediaan pupuk dll	Bagian Perekonomian	Setda
			2	Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan KUR	Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR dibagi seluruh UMKM yang terdata di SIKP dikalikan 100%	Untuk mengetahui UMKM yang mendapatkan KUR	Bagian Perekonomian	Setda
			3	Deviden yang disetorkan ke kab. Batang	Jumlah deviden yang disetor	Untuk mengetahui penerimaan deviden	Bagian Perekonomian	Setda
			4	Data sarana ibadah Kab. Batang	Jumlah sarana ibadah di Kab. Batang	Jumlah sarana ibadah di Kab. Batang	Bagian Kesra	Setda
			5	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi keberangkatannya	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi keberangkatannya	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi keberangkatannya	Bagian Kesra	Setda
			6	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi kepulangannya	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi kepulangannya	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi kepulangannya	Bgaian Kesra	Setda
			7	Jumlah TPHD / TKHD yang	Jumlah TPHD/TKHD	Jumlah TPHD/ TKHD	Bagian Kesra	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				tersedia sesuai perhitungan kuota haji			
			8	Jumlah Kholifah qori, hafiz, dan mufasir	Jumlah Kholifah qori, hafiz, dan mufasir	Jumlah Kholifah qori, hafiz, dan mufasir	Bagian Kesra Setda
			9	Jumlah penyelenggaraan tarling di 15 kecamatan	Jumlah penyelenggaraan tarling di 15 kecamatan	Jumlah penyelenggaraan tarling di 15 kecamatan	Bagian Kesra Setda
			10	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Bagian Kesra Setda
			11	Jumlah pelaksanaan kerjasama / kesepakatan bersama lingkup dalam negeri, luar negeri, dan pihak luar	Jumlah pelaksanaan kerjasama / kesepakatan bersama lingkup dalam negeri, luar negeri, dan pihak luar	Jumlah pelaksanaan kerjasama / kesepakatan bersama lingkup dalam negeri, luar negeri, dan pihak luar	Bagian Humas Setda
			12	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati ke luar daerah	Bagian Umum Setda
	Sekretariat DPRD						
1		Terwujudnya SDM aparatur yang profesional	1	Pegawai yang mengikuti pelatihan / workshop dst	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ workshop	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ workshop	Bagian Administrasi Kesekretariatan Sekretariat DPRD
			2	Bintek / workshop yang	Jumlah bintek/	Jumlah bintek/	Bagian Sekretariat

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
			diselenggarakan untuk SDM Setwan	workshop untuk SDM Setwan	workshop untuk SDM Setwan	Administrasi Kesekretariatan	DPRD	
2		Terwujudnya SDM legislatif yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya	1	Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ workshop	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ workshop	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ workshop	Bagian Legislasi	Sekretariat DPRD
			2	Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM DPRD	Jumlah Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM DPRD	Jumlah Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM DPRD	Bagian Legislasi	Sekretariat DPRD
3		Terwujudnya pelayanan administrasi yang tertib dan memuaskan	1	Prosentase laporan/ risalah rapat yang dibuat	Laporan/ Risalah yang dibuat dibagi jumlah laporan dikali 100%	Laporan/ Risalah yang dibuat dibagi jumlah laporan dikali 100%	Bagian Legislasi	Sekretariat DPRD
			2	Laporan yang dikirim tepat waktu	Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu	Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu	Bagian Legislasi	Sekretariat DPRD
			3	Aduan yang ditindaklanjuti Sekwan untuk diajukan/ ditinakanlanjutan pada Pimpinan DPRD	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Bagian Legislasi	Sekretariat DPRD
4		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang representatif	1	Prosentase sarana prasarana kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana kondisi baik di bagi jumlah sarana prasarana yang ada dikalikan 100%	Jumlah sarana dan prasarana kondisi baik di bagi jumlah sarana prasarana yang ada dikalikan 100%	Bagian Administrasi Kesekretariatan	Sekretariat DPRD
5		Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan sidang DPRD dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	1	Rapat-rapat yang difasilitasi/diselenggarakan	Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan	Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan		Sekretariat DPRD
			2	Penyebarluasan informasi	Jumlah penyebarluasan	Jumlah		Sekretariat

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
			kegiatan DPRD	informasi kegiatan	penyebarluasan informasi kegiatan		DPRD	
	Inspektorat							
1.		Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	1	Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	Jumlah temuan tahun berjalan dibagi jumlah pada tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat
2			Penurunan jumlah temuan kerugain negara/pemborosan (bersifat finansial)	Jumlah temuan kerugian negara/ pemborosan (bersifat finansial) tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV		
3			Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah aduan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV		
2.		Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD	1	Opini Laporan Keuangan Pemda	Perbandingan opini BPK tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat
3.		Meningkatnya kualitas LAKIP Pemda dan LAKIP OPD	1	Nilai hasil evaluasi LAKIP pemda	Jumlah PD yang memiliki nilai evaluasi sangat baik		Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat
			2	Jumlah OPD yang nilai LAKIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	Rasio perolehan nilai evaluasi LKjIP PD tahun berjalan dan tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV	
4.		Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan	1	Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	Jumlah temuan tahun berjalan yang ditindaklanjuti		Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				dibagi dengan temuan sampai dengan akhir tahun sebelumnya			
		Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1 Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat	Jumlah SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat tahun berjalan dibagi dengan Jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV	
			2 Jumlah SDM bersertifikat auditor	Jumlah SDM bersertifikat auditor tahun berjalan dibagi dengan jumlah samapi dengan akhir tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV	<i>Inspektorat</i>
5		Meningkatnya integritas SDM pengawas	1 Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas	Jumlah aduan dibagi dengan jumlah jumlah aduan sampai dengan akhir tahun sebelumnya		Irbanwil I/II/III/IV	
	<i>Disdikbud</i>						
1.		Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1 Rata-Rata Lama Sekolah	Jumla seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan 100%	Jumla seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan 100%		<i>Disdikbud</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
			2	Harapan Lama Sekolah Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada ta P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t i Usia (a, a + 1, ..., n) FK Faktor koreksi pesantren			<i>Disdikbud</i>
			3	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif dapat baca dan tulis dibagi jumlah penduduk usia produktif seluruhnya dikalikan 100%		<i>Disdikbud</i>
2.		Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsive dan partisipatif	1	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1 / D4	Jumlah guru yang berkualifikasi S1/ D4 dibagi jumlah guru yang ada dikalikan 100%	Kabid ketenagaan	<i>Disdikbud</i>
3.		Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal	1	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Jumah festival seni di daerah dibagi jumlah peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemda dikalikan 100%	Kabid Kebudayaan	<i>Disdikbud</i>
4.		Meningkatnya professional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SKM terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Untuk meningkatkan tata kelola dan tata nilai sumberdaya aparatur pendidikan dan kebudayaan yang efektif, profesional	Sekretariat <i>Disdikbud</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
		menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat			dan pelibatan publik			
	<i>Satpol PP</i>							
1.		Meningkatkan kualitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	a	Jumlah Linmas per Desa / Kelurahan	Jumlah penduduk Kab. Batang dibagi 10.000 penduduk dikalikan target	Untuk mengetahui target yang dicapai	Kabid Linmas	<i>Satpol PP</i>
			b	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah pos kampling Kab. Batang dibagi jumlah desa dan kelurahan di Kab. Batang	Untuk mngetahui target yang dicapai		<i>Satpol PP</i>
2.		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup	a	Prosentase jumlah pelanggaran terhadap perda yang diselesaikan dibanding jumlah pelanggaran Perda dan / atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan	Jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dibagi jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan kali 100%		Kabid Gakda	<i>Satpol PP</i>
			b	Terlaksananya cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh kecamatan	Jumlah regu dikalikan jumlah personil anggota patroli dibagi jumlah kecamatan		Kabid Trantib	<i>Satpol PP</i>
3		Meningkatnya standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah satgas damkar yang memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi			<i>Satpol PP</i>
4		Meningkatnya cakupan mobil damkar yang laya		Jumlah mobil pemadam kebakaran 3.000 liter pada	Jumlah WMK memiliki mobil/mesin damkar			<i>Satpol PP</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
		pakai dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK)		wilayah manajemen kebakaran (WMK)	layak pakai		
	DP3AP2KB						
1.		Terakomodasi kepentingan perempuan dan anak	a	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dibagi jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang ada		DP3AP2KB
2.		Peserta KB aktif dan peserta KB baru	a	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	Jumlah peseta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur		DP3AP2KB
			b	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Jumlah anak dibagi jumlah keluarga		DP3AP2KB
3.		Menurunnya PUS yang ber-KB tidak terlayani		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (Unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber -KB tidak terlayani dibagi jumlah PUS		DP3AP2KB
4.		Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKB		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Jumlah anggota BKB yang ber -KB dibagi jumlah anggota BKB		DP3AP2KB
5.		Semakin bertambah anggota kelompok UPPKS menjadi peserta KB		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber – KB dibagi jumlah PUS anggota UPPKS		DP3AP2KB
6.		Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB		Ratio penyuluh KB / petugas Lapangan 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 Desa /	Jumlah penyuluh KB/petugas lapangan dibagi Jumlah		DP3AP2KB

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
			Kelurahan	desa/kelurahan			
7.		Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 1 PPKBD	Jumlah PPKBD dibagi jumlah desa/ kelurahan			<i>DP3AP2KB</i>
8.		Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi kependudukan dan KB berbasis TI	Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan	Jumlah penyedia data mikro keluarga dibagi desa/ kelurahan			<i>DP3AP2KB</i>
<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>							
1.		Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan melalui penyediaan sarana produksi dan infrastruktur serta alat dan mesin pertanian	1	Produktivitas Padi sawah	Jumlah produksi padi (ton) dibagi luas areal tanam padi di sawah		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			2	Produksi Padi	Jumlah produksi padi pertahun		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			3	Produktivitas Jagung	Jumlah produksi jagung dibagi luas areal tanam jagung		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			4	Produksi Jagung	Jumlah produksi jagung		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			5	Nilai Tukar Petani	Indeks yang diterima petani dibagi indeks yang dibayar petani		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi PDRB ADHB dari sektor pertanian dibagi jumlah PDRB ADHB dikali 100%		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
			7	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi PDRB ADHB dari sektor pertanian (palawija) dibagi jumlah PDRB ADHB dikali 100%		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			8	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi PDRB ADHK dari sektor pertanian (palawija) dibagi jumlah PDRB ADHK dikali 100%		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
2.		Meningkatnya ketersediaan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1	Ketersediaan Pangan Utama			<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
				- Beras	Jumlah ketersediaan pangan (beras) dibagi jumlah kebutuhan konsumsi selama satu tahun		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
				- Jagung	Jumlah ketersediaan pangan (jagung) dibagi jumlah kebutuhan konsumsi selama satu tahun		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			2	Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan daerah dibagi standar cadangan pangan kabupaten		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
3.		Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok		Presentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi asokan, harga, dan akses pangan dibagi		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				jumlah akses informasi yang ada			
4.		Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	1	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita			<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
				- Energi per Kapita	(Ketersediaan pangan per kapita per hari dikali kandungan kalori kali BDD) dibagi 100		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
				- Protein per Kapita	(Ketersediaan pangan per kapita per hari dikali kandungan protein kali BDD) dibagi 100		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
			2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
5.		Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM	1	Jumlah Kelompok Tani Binaan	Jumlah kelompok tani binaan		<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>
<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>							
2.		Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1	Jumlah pelaku usaha/perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	Jumlah pelaku usaha / perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	Kabid Tata Lingkungan	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
4.		Terwujudnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam		Jumlah bantuan bibit tanaman penghijauan	Jumlah bantuan bibit tanaman penghijauan	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2		3	4	5	6	7
6.		Peningkatan Ruang Terbuka Hijau		Rasio Ruang Terbuka Hijau	Jumlah kawasan lindung dibagi jumlah ruang terbuka hijau		Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
7.		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1	Persentase penanganan sampah	Jumlah penduduk per 1.000 dibagi jumlah bank sampah dikalikan 100%		Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	<i>Disparpora</i>							
1.		Peningkatan jumlah wisatawan		Meningkatnya jumlah wisatawan (nusantara/ asing) yang mengunjungi destinasi wisata di Kab. Batang	Jumlah wisatawan per tahun	Mengetahui jumlah pengunjung di destinasi wisata	Kabid Destinasi	<i>Disparpora</i>
2.		Obyek wisata yang ditangani		Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan	Jumlah obyek wisata yang dikelola selama 1 tahun	Jumlah/banyaknya wisata yang dipelihara melalui dana APBD, DAK dalam 1 tahun	Kabid Destinasi	<i>Disparpora</i>
3.		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah retribusi obyek wisata yang dikelola oleh disparpora dalam 1 tahun	Jumlah retribusi wisata yang dikelola oleh disparpora dalam 1 tahun	Kabid Destinasi	<i>Disparpora</i>
4.		Persentase pemuda berwirausaha		Peningkatan kemampuan dan pengetahuan pemuda	Jumlah pemuda yang sudah mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan berwirausaha	Mengetahui jumlah pemuda yang sudah berwirausaha	Kabid Pemasaran	
5.		Jumlah organisasi pemuda yang dibina		Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Jumlah organisasi pemuda yang dibina oleh disparpora dalam 1 tahun	Mengetahui peambahan jumlah organisasi pemuda dalam 1 tahun	Kabid PORA	<i>Disparpora</i>
6.		Jumlah organisasi olahraga		Jumlah organisasi olahraga	Jumlah organisasi	Mengetahui jumlah	Kabid PORA	<i>Disparpora</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
		yang di bina	yang di bina	olahraga yang dibina oleh disparpora dalam 1 tahun	organsasi olahraga yang aktif dalam 1 tahun		
7.		Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga di tingkat provinsi Jawa Tengah	Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti	Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti oleh disparpora selama 1 tahun	Menetahui jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti	Kabid PORA	<i>Disarpora</i>
DPMPTSP dan Naker							
1.		Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang	1	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang	Jumlah realisasi proyek investasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Rasio kepeminatan investasi	Jumlah pendaftaran investasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			4	Rasio pelayanan perijinan	Jumlah perijinan yang diterbitkan dibagi jumlah pelayanan perijinan		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			5	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	Jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan register pendaftaran dan register izin		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			6	Jumlah dokumen kajian	Jumlah buku/ dokumen laporan		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
2.		Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja	1	Tingkat kesempatan kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah penempatan tenaga kera ditambah		<i>DPMPTSP dan Naker</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				jumlah job kampasing			
3.		Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1	Tingkat wirausaha baru	Jumlah pemuda berwirausaha dibagi pencari kerja dikali 100		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Rasio pemuda berwirausaha	Jumlah pemuda wirausaha baru dibagi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			3	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	Jumlah permasalahan ketenagakerjaan (perselisihan antara pengusaha-pekerja terkait hak pekerja)		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
6.		Meningkatnya penempatan penyelenggaraan transmigrasi	1	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah KK yang minat transmigrasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Jumlah Warga	Jumlah warga yang bertransmigrasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			3	Jumlah KK dan anggota keluarga yang bertransmigrasi	Jumlah KK dan anggota keluarga yang bertransmigrasi sesuai kuota dari provinsi Jawa Tengah		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
	Dinas Kesehatan						
1.		Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian serta Peningkatan status Gizi Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin, nifas dalam satu tahun dibagi jumlah kelahian hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	Bidang Kesmas	<i>Dinas Kesehatan</i>
			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian anak	Bidang	<i>Dinas</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				usia kurang dari 1 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000		Kesmas	<i>Kesehatan</i>
			3	Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA)	Jumlah kematian anak usia kurang dari 5 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Bidang Kesmas	<i>Dinas Kesehatan</i>
			4	Angka kematian umum pasien yang dirawat di RSUD (Gross Death Rate/ GDR)	Jumlah pasien keluar mati dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1.000		<i>Dinas Kesehatan</i>
			5	Angka pasien keluar yang meninggal >48 jam perawatan di RS (Net Death Rate/ NDR)	Jumlah pasien keluar mati >48 jam dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1.000		<i>Dinas Kesehatan</i>
			4	<i>Case Notification Rate (CNR)</i> kasus baru TB	Jumlah seluaruh kasus baru TB dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100.000 penduduk		<i>Dinas Kesehatan</i>
			5	kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA) positif (Cure Rate / CR)	Jumlah penderita TB BTA + yang sembuh dibagi jumlah penderita TB BTA + yang diobati dikali 100		<i>Dinas Kesehatan</i>
			6	angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (<i>Icidence</i>)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dibagi		<i>Dinas Kesehatan</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
				Rate / IR DBD)	jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100.000			
			7	Angka penemuan kasus baru kusta (<i>New Case Detection Rate / NCDR</i>)	Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100.000		Dinas Kesehatan	
			8	angka kesakitan malaria (<i>Annual Parasite Incidence / IR</i>)	Jumlah penderita malaria positif yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100.000		Dinas Kesehatan	
			9	prevalensi Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan (berat badan/tinggi badan) dibagi jumlah balita yang ada dikalikan 100		Dinas Kesehatan	
	DPU PR							
1.		Jalan dan jembatan kondisi baik		Persentase jalan dan jembatan yang direhab dan dibangun	(Persentase panjang jalan jembatan yang dibangun + persentase panjang jalan, jembatan yang direhab)/2	Mengetahui persentase panjang jalan, jembatan yang dibangun dan direhab	Kabid prasarana jalan dan jembatan	DPU PR
2.		Jaringan irigasi dalam kondisi baik		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikalikan 100%	Mengetahui luas irigasi dalam kondisi baik tahun yang bersangkutan	Kabid Pengairan	DPU PR

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	5	6	7
3.		Ruang terbuka hijau yang tertibkan	1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah ber HPL / HGB dikalikan 100%	Untuk mengetahui informasi kawasan tata ruang yang tertibkan	Kabid Penataan Ruang	DPU PR
			2	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan dikali 100%	Untuk mengetahui jumlah pelanggaran RTRW	Kabid Penataan Ruang	DPU PR
			3	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Luasan RTH publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM dibagi luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan dikalikan 100%	Untuk mengetahui kawasan RTH di perkotaan	Kabid Penataan Ruang	DPU PR
	DPRKP							
1		Meningkatkan jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	1	Prosentase rehabilitasi rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah rumah keseluruhan dikali 100%	Untuk mengetahui jumlah rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	Kabid Perumahan dan Pertanahan	DPRKP
2		Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan		Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%	Untuk mencapai target 100% akses sanitasi layak	Kabid pemukiman	DPRKP
3		Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih/ air minum		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%	Untuk mencapai target 100% akses tanah bersih	Kabid pemukiman	DPRKP
4		Menurunnya kawasan		Prosentase pemukiman	Luas lingkungan	Untuk mencapai target	Kabid	DPRKP

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	5	6	7
		pemukiman kumuh perkotaan		kumuh	pemukiman kumuh dibagi jumlah luas wilayah dikalikan 100%	0% pemukiman kumuh	Perumahan dan Pertanahan	
5		Terwujudnya penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Jumlah tanah pemda yang disertifikat	Tanah pemda yang bersertifikat tahun yang bersangkutan	Untuk mengetahui jumlah aset tanah pemda yang bersertifikat	Kabid Perumahan dan Pertanahan	DPRKP
			2	Prosentase penyelesaian kasus tanah	Jumlah kasus yang ditangani dibagi kasus tanah yang terdaftar dikalikan 100%	Untuk mengetahui jumlah kasus tanah yang tertangani	Kabid Perumahan dan Pertanahan	DPRKP
6		Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	1	Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi jumlah jalan lingkungan seluruhnya dikalikan 100%	Untuk mengetahui panjang jalan yang terbangun	Kabid Pemukiman	DPRKP
			2	Prosentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi baik dibagi jumlah drainase lingkungan seluruhnya dikalikan 100%	Untuk mengetahui panjang drainase yang terbangun	Kabid Pemukiman	DPRKP
7		Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman yang kondusif	1	Prosentase taman dalam kondisi baik	Jumlah taman yang tertata dibagi jumlah taman seluruhnya dikalikan 100%	Untuk mengetahui jumlah taman yang tertata dan terpelihara	Kabid Pemukiman	DPRKP
	Disdukcapil							
1.		Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi	1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Jumlah penduduk usia >17 yang telah ber KTP dibagi jumlah			Disdukcapil

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
		kependudukan yang menyeluruh		penduduk usia >17 atau telah menikah				
			2	Rasio bayi ber-akta kelahiran	Jumlah bayi berakte kelahiran dibagi jumlah bayi			<i>Disdukcapil</i>
			3	Rasio pasangan ber-akta nikah	Jumlah pasangan nkaah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah			<i>Disdukcapil</i>
			4	Rasio akta kematian	Jumlah kematian yang sudah mempunyai akte kematian dibagi jumlah seluruh kematian			<i>Disdukcapil</i>
			5	Kepemilikan KTP	Jumlah penduduk diatas 17 atau sudah menikah yang memiliki KTP			<i>Disdukcapil</i>
	<i>Diskominfo</i>							
1		Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	1	Jumlah jaringan komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	Untuk mengetahui jumlah titik jaringan komunikasi di Kab. Batang	Kabid Penyelenggaraan E-Government	<i>Diskominfo</i>
			2	Website milik pemerintah daerah	Jumlah website OPD	Untuk mengetahui OPD yang memiliki website	Kabid Penyelenggaraan E-Government	<i>Diskominfo</i>
			3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah KIM	Untuk mengetahui jumlah kelompok informasi masyarakat	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			4	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	Jumlah distribusi informasi per bulan	Untuk mengetahui jumlah desiminasi	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
				nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi		informasi nasional melalui media massa seperti majalah dan radio		
			5	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media online seperti website dan media lainnya	Jumlah distribusi informasi per bulan	Untuk mengetahui jumlah diseminasi informasi nasional melalui media online seperti website dan media lainnya	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Jumlah distribusi informasi per bulan	Untuk mengetahui jumlah diseminasi informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya	Jumlah distribusi informasi per bulan	Untuk mengetahui jumlah diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	Jumlah distribusi informasi per bulan	Untuk mengetahui jumlah diseminasi informasi nasional melalui media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
				Jumlah penyiaran radio / TV	Jumlah penyiaran radio	untuk mengetahui	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
			lokal		jumlah radio			
2.		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Jumlah sistem unggulan dalam smart city	Jumlah sistem informasi smart city	Untuk mengetahui jumlah informasi smart city	Kabid penyelenggara an E-Government	<i>Diskominfo</i>
			2	Jumlah Desa yang menerapkan Smart Village	Jumlah desa yang menerapkan smart village	Untuk mengetahui jumlah desa yang menerapkan smart village	Kabid penyelenggara an E-Government	<i>Diskominfo</i>
			3	Keberhasilan pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik melalui VPN	Persentase keberhasilan VPN	Untuk mengetahui presentase keberhasilan penerimaan dokumen elektronik melalui VPN	Kabid penyelenggara an E-Government	<i>Diskominfo</i>
			4	Penyelenggaraan jaringan Komunikasi sandi	Persentase penyelenggaraan jaringan Komunikasi sandi	Untuk mengetahui presentase Untuk mengetahui presentase	Kabid penyelenggara an E-Government	<i>Diskominfo</i>
3		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan, penanggaran dan pelaksanaan	1	Buku kabupaten Batang Dalam Angka	Ada/tidak		Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			2	Buku Kecamatan di wilayah Kabupaten Batang Dalam Angka	Ada/tidak		Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			3	Single Data Sistem	Ada/tidak		Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			4	Buku PDRB dan IHK	Ada/tidak		Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			5	Buku NTP dan Distrbusi	Ada/tidak		Kabid layanan	<i>Diskominfo</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
			Pendapatan			informasi dan statistik	
			6 Info Grafis Kabupaten dalam Angka	Ada/tidak		Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
	<i>Dislutkana</i>						
1		Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan	1 Prosentase penyerapan anggaran pada program Non urusan	Realisasi penyerapan anggaran dibagi pagu anggaran dikaliakn 100%		Sekretariat	<i>Dislutkanak</i>
2.		Terlaksananya sosialisasi, pendampingan usaha dan akses permodalan pada usaha pemasaran produk perikanan dan peternakan guna meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan dan peternakan	Tingkat konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	Jumlah konsumsi ikan (kg) dibagi target konsumsi ikan daerah dikalikan 100%			<i>Dislutkanak</i>
	2 Konsumsi Protein (gr/kapita/hr):					Kabid Peternakan	<i>Dislutkanak</i>
	-Daging						
	-Telur						
	- susu						
3.		Terselenggaranya bantuan sarpras dan pembinaan/ pelatihan peningkatan ketrampilan kapasitas SDM pelaku usaha kelautan perikanan dan peternakan	1 Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun		Kabid Perikanan tangkap	<i>Dislutkanak</i>
	2 Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun		Kabid Perikanan Tangkap	<i>Dislutkanak</i>	
4.		Tersedianya SDM dan sarpras pendukung pelayanan kesehatan hewan untuk meningkatkan ketersediaan	1 Produksi hasil Ternak :			Kabid Peternakan	<i>Dislutkanak</i>
	-Daging (kg)		Jumlah produksi hasil ternak (daging) per tahun			<i>Dislutkanak</i>	

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
		pangan segar	-Susu (liter)	Jumlah produksi hasil ternak (susu) per tahun			<i>Dislutkanak</i>
			-Telur (kg)	Jumlah produksi hasil ternak (telur) per tahun			<i>Dislutkanak</i>
	<i>Dinas Sosial</i>						
1.		Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	PMKS yang berhasil direhabilitasi	PMKS yang berhasil direhabilitasi/PMKS yang direhabilitasi dikali 100%		<i>Dinas Sosial</i>
			2	PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial/PMKS yang seharusnya diberikan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100%		<i>Dinas Sosial</i>
			3	Rasio Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan	Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan/PMKS yang seharusnya diberikan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100%		<i>Dinas Sosial</i>
2.		Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial		Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos/PSKS yang seharusnya aktif dalam		<i>Dinas Sosial</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				pembangunan Kesos dikali 100%			
	Bapelitbang						
1.		Tercapainya sasaran pembangunan daerah	1 Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Capaian pembangunan bidang Sosbud, Ekonomi, dan IPW dibagi target capaian pembangunan RPJMD dikalikan 100%		Bidang Sosbud, Ekonomi, dan IPW	Bapelitbang
2.		Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah	1 Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Jumlah kegiatan yang ada di RKPD tahun N dibagi jumlah kegiatan yang ada di DPA tahun N dikalikan 100%			Bapelitbang
			2 Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Data dan informasi yang tersedia dalam perencanaan pembangunan dibagi data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dikalikan 100%			Bapelitbang
3		Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1 Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang dibagi jumlah masyarakat yang diundang dalam musrenbang dikalikan 100%		Bidang Perencanaan	Bapelitbang
4		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas	1 Nilai SAKIP Bapelitbang	Hasil penilaian terhadap SAKIP oleh Inspektorat			Bapelitbang

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
		penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah			daerah			
5		Meningkatnya Inovasi dalam berbagai sektor	1	Prosentase OPD Inovatif	Jumlah OPD inovatif dibagi jumlah OPD yang ada dikalikan 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang	
6		Meningkatnya peran serta masyarakat/ stakeholder dalam kegiatan kelitbangan daerah	1	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah dibagi hasil kelitbangan yang ada dikalikan 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang	
	BPKPAD							
1.		Peningkatan jumlah wajib pajak		Persentase peningkatan jumlah wajib pajak	Jumlah wajib pajak tahun N dikurangi jumlah wajib pajak tahun N-1 dibagi jumlah wajib pajak tahun N-1 dikalikan 100%	Untuk mengetahui peningkatan jumlah wajib pajak	Bidang Administrasi PAD	BPKPAD
2.		Penyusunan APBD tepat waktu		Tersusunnya APBD sesuai jadwal	APBD ditetapkan dibagi jadwal penetapan APBD dikalikan 100%	Untuk mengetahui ketepatan jadwal penetapan APBD	Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan	BPKPAD
3.		Peningkatan baku PBB		Persentase peningkatan baku PBB	Baku PBB akhir dikurangi baku PBB awal dibagi baku PBB awal dikalikan 100%	Untuk mengetahui peningkatan baku PBB	Bidang Administrasi PAD	BPKPAD
4.		Pemanfaatan teknologi		Persentase OPD yang	Jumlah OPD	Untuk mengetahui	Bidang	BPKPAD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
		informasi secara efektif dan efisien	menggunakan teknologi informasi	memanfaatkan SIMDA dibagi jumlah OPD dikalikan 100%	penggunaan TI secara efektif dan efisien	Anggaran dan Dana Perimbangan	
5.		Desa lunas PBB tepat waktu	Persentase desa lunas PBB tepat waktu	Jumlah desa lunas PBB dibagi jumlah desa dikalikan 100%	Untuk mengetahui jumlah desa yang lunas PBB tepat waktu	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP	BPKPAD
6.		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD tahun N dikurangi PAD tahun N-1 dibagi PAD tahun N-1 dikalikan 100%	Untuk mengetahui kenaikan pendapatan asli daerah tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP	BPKPAD
7.		Tertibnya pencatatan barang milik daerah	Persentase perangkat daerah yang melaporkan BMD tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah PD kirim lap BMD tepat waktu dibagi jumlah PD dikalikan 100%	Untuk mengetahui OPD yang melaporkan barang milik daerah/ aset OPD	Bidang aset daerah	BPKPAD
8		Realisasi penerbitan SP2D terhadap anggaran kas triwulan	Persentase realisasi penerbitan SP2D terhadap anggaran kas triwulan	SP2D terbit dibagi anggaran kas triwulan dikalikan 100%	Untuk mengetahui realisasi anggaran terhadap anggaran kas triwulan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	BPKPAD
9.		Laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	Pelaporan keuangan daerah tepat waktu	Laporan keuangan dikirim dibagi batas akhir pengiriman laporan keuangan dikalikan 100%	Untuk mengetahui ketepatan pengiriman laporan keuangan daerah	Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan	BPKPAD
	BKD						
1.		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1 Prosentase akurasi data kepegawaian	Jumlah realisasi perubahan data dibagi jumlah perubahan data kepegawaian dikali	Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan data kepegawaian yang		BKD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				100%	akurat		
			2	Prosentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	Jumlah realisasi SK KP dibagi jumlah usulan SK KP ke BKN dikali 100%	Untuk meningkatkan pelayanan Prima pada ASN	BKD
			3	Prosentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	Jumlah realisasi SK Pensiun tepat waktu dibagi jumlah usulan SK pensiun dikali 100%	Untuk meningkatkan pelayanan Prima pada ASN	BKD
			4	Prosentase tertibnya arsip data kepegawaian	Jumlah arsip perubahan data kepegawaian yang diterima dibagi jumlah realisasi perubahan data kepegawaian tahun berjalan kali 100%	Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan data kepegawaian yang tertib	BKD
			5	Prosentase peserta yang lolos STTD	Jumlah peserta yang lolos seleksi STTD dibagi jumlah pendaftar seleksi STTD dikali 100%		BKD
			6	Prosentase usulan formasi yang ditetapkan kemenpan RB	Jumlah formasi yang disetujui Kemapan RB dibagi jumlah formasi yang diusulkan Kab. Batang ke Kemenpan RB dikali 100%	Untuk mengisi lowongan formasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan	BKD
2.		Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya	1	Prosentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berjalan dibagi jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu dikali		BKD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
		kedisiplinan ASN		100%				
			2	Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim	Jumlah realisasi pejabat struktural yang mengikuti diklatpim dibagi jumlah rencana pengiriman pejabat struktural untuk mengikuti diklatpim dikali 100%			BKD
			3	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Jumlah realisasi ASN yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah rencana pengiriman ASN untuk mengikuti diklat teknis dikali 100%			BKD
			4	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	Jumlah realisasi ASN yang mengikuti diklat fungsional dibagi jumlah rencana pengiriman ASN untuk mengikuti diklat fungsional dikali 100%			BKD
			5	Prosentase pejabat yang mengikuti tes kompetensi	Jumlah realisasi Pejabat yang mengikuti tes kompetensi dibagi jumlah rencana pejabat yang akan diuji kompetensi dikali 100%			BKD
	Kesbangpol							
1		Meningkatnya pemahaman	1	Persentase pembinaan	Jumlah masyarakat		Kesbangpol	

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
		masyarakat tentang wawasan kebangsaan		terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan	penerima wasbang dibagi per 1000 elemen masyarakat dikali 100%		
2		Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan bantuan partai politik	2	Persentase partai politik yang patuh dengan tata cara penggunaan bantuan keuangan parpol	Jumlah parpol yang menerima bantuan dibagi jumlah parpol yang tertib administrasi dikalikan 100%		<i>Kesbangpol</i>
			3	Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang pendidikan politik dan negeri	Jumlah peserta yang paham pendidikan politik dibagi jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik dikalikan 100%		<i>Kesbangpol</i>
	BPBD						
1.		Persentase Daerah Rawan Bencana	1	Penurunan jumlah desa / kelurahan rawan bencana			BPBD
			2	Sosialisasi Budaya Sadar Bencana			BPBD
			3	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana			BPBD
			4	Pemasangan rambu bencana dan jalur evakuasi			BPBD
			5	Pelatihan Relawan PB untuk penanganan masyarakat rentan			BPBD
			6	Rapat koordinasi pengurangan resiko bencana			BPBD
2.		Persentase ketersediaan	1	Fasilitasi Kegiatan Kajian			BPBD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	5	6	7	
		peta resiko bencana		Resiko Bencana Kab. Batang				
	<i>Dispermades</i>							
1		Meningkatnya jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah kelompok binaan LPM dibagi jumlah LPM	Untuk mengetahui rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
2		Meningkatnya jumlah kelompok binaan PKK	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK dibagi jumlah PKK	Untuk mengetahui rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
3		Meningkatnya jumlah LPM berprestasi	1	LPM berprestasi	Jumlah LPM berprestasi dibagi jumlah LPM dikalikan 100%	Untuk mengetahui jumlah LPM berprestasi	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
4		Meningkatnya jumlah PKK aktif		PKK aktif	Jumlah PKK aktif dibagi jumlah PKK dikalikan 100%	Untuk mengetahui jumlah PKK aktif	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
5		Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat dibagi total program pemberdayaan masyarakat dikalikan 100%	Untuk mengetahui jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Kabid pemberdayaan desa dan kelurahan	<i>Dispermades</i>
6		Meningkatnya kapasitas aparatur pemdes/ kelurahan		Kapasita aparatur pemdes/ kelurahan	Jumlah aparatur pemdes/ kelurahan yang telah mengikuti pelatihan dibagi jumlah aparatur desa yang ada	Untuk mengetahui jumlah aparatur pemdes/kelurahan	Kabid pemberdayaan desa dan kelurahan	<i>Dispermades</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/ alasan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	5	6	7
				dikalikan 100%			
7		Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Jumlah balita aktif	Jumlah balita aktif di kegiatan posyandu dibagi jumlah balita dikalikan 100%	Untuk mengetahui jumlah balita aktif	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
	Kecamatan						
1.		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (mudah , cepat dan memuaskan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM terhadap pelayanan masyarakat			Kecamatan
2.		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Pencurian	Jumlah kasus pencurian per tahun			Kecamatan
3.		Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang ekonomi produktif	Jumlah Keluarga Prasejahtera	Jumlah keluarga miskin pra sejahtera per tahun			Kecamatan

BUPATI BATANG,

WIHAJI